

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SISIR KECAMATAN BATU KOTA BATU

Liahati, Dewi Citra Larasati

Program Studi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Email: liahati58@gmail.com

***Abstract:** One of the initial requirements to overcome poverty is by identifying the targeted groups and regions correctly. According to the regulation, one of the PKH strategies is to encourage provincial and district / city governments through their respective Social Service Offices to use PKH as a strategy to reduce poverty in their regions. This research method used a qualitative descriptive with a snowball sampling. From the result it can be seen that the implementation of PKH to reduce the poverty through four important things, they are communication process, resources, disposition and a good and responsible bureaucratic, a sense of caring, motivating and arousing the awareness of the family program participants in fulfilling their goals and expectations. The factors that influence the implementation of program are the supporting factors that can be seen from the guide support and encouragement to the participants so they become more aware of the importance of technology and a decent life. The inhibiting factors tend to arise because of the lack response from superiors to the problems faced by PKH participants. Other than that, the PKH participants should be more aware of the importance of technology in order to make the programme implementation easier.*

***Keywords:** Policy Implementation, Indonesia Caonditional Cash Transfer Programme (PKH), Poverty Reduction*

ABSTRAK: Salah satu syarat untuk menanggulangi kemiskinan yaitu dengan cara melakukan identifikasi terhadap kelompok dan wilayah sasaran yang ingin dituju dengan tepat. Sesuai dengan ketentuan, salah satu strategi PKH adalah mendorong pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui Kantor Dinas Sosial masing-masing untuk menggunakan PKH sebagai salah satu strategi untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan *Snowball Sampling*. Hasil penelitian ini Implementasi PKH dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dapat dilihat dari empat hal yaitu proses komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang dilakukan sudah baik dengan adanya tanggungjawab, rasa kepedulian, memberikan motivasi dan menggugah kesadaran peserta program keluarga harapan dalam memenuhi tujuan dan harapan yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi program keluarga harapan yaitu adanya faktor pendukung yang dapat dibuktikan dengan adanya tanggungjawab pendamping kepada peserta program keluarga harapan untuk selalu mendorong mereka agar lebih sadar akan pentingnya teknologi dan hidup yang lebih layak. Adapun faktor Penghambat cenderung muncul karena kurangnya tanggapan dari pihak atasan terhadap masalah yang dihadapi oleh peserta PKH. Tidak terlepas juga dari peserta PKH untuk selalu lebih sadar akan pentingnya teknologi, sehingga lebih mempermudah dalam proses pelaksanaan program keluarga harapan.

***Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH), Penanggulangan Kemiskinan*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Maka dari itu, upaya untuk menanggulangi kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif. Dalam hal ini ada dua strategi utama yang harus ditempuh oleh pemerintah. Yang Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Yang Kedua,

memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah selama ini untuk memberikan peluang pada masyarakat miskin untuk mengurangi kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibatnya banyaknya jumlah orang dalam 1 keluarga, ekonominya kurang baik, lapangan kerja yang masih kurang, pendidikan yang rendah, dan kurangnya keterampilan. Salah satu syarat awal untuk menanggulangi kemiskinan yaitu dengan cara melakukan identifikasi terhadap kelompok dan wilayah sasaran yang ingin dituju dengan tepat. Program pengentasan dan nasib orang miskin sangat bergantung dari langkah awal yang dilakukan yaitu ketepatan dalam mengidentifikasi siapa yang dikategorikan miskin dan di mana dia tinggal.

Program percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, mulai digalakkan pada tahun 2007 dengan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagai prioritas nasional dalam lima tahun mendatang (2010-2015) PKH pelaksanaannya dititikberatkan pada perluasan jangkauan pelayanan terhadap target RTSM dan wilayah pelaksanaan kegiatan PKH. Sesuai dengan ketentuan, salah satu strategi PKH adalah mendorong pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui Dinas Sosial masing-masing untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah. Dengan menggunakan sistem yang mekanisme yang telah diatur di dalam Pedoman Umum PKH 2007, pemerintah daerah dapat melanjutkan program ini terhadap RTSM peserta PKH apabila dipandang pendapatannya masih berada dibawah garis kemiskinan. Selan itu, pemerintah daerah juga dapat memperluas jangkauan pelayanan PKH kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) agar lepas dari masalah kemiskinan. Mengingat PKH adalah program prioritas nasional, maka tidak hanya Kementerian Sosial yang harus melaksanakannya tetapi pemerintah daerah juga bisa mengembangkan dan melanjutkannya sesuai dengan kemampuan dukungan APBD.

Pendampingan pemanfaatan dana bantuan dilakukan di tiap kecamatan dan bertujuan supaya para ibu rumah tangga penerima dana program Keluarga Harapan bisa menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Apabila ada penyelewengan penggunaan dana maka pihak Dinas Sosial akan dikenai sanksi penghentian bantuan. Permasalahan di Kelurahan Sisir terkait anak sekolah sangatlah beragam. Ada beberapa ibu rumah tangga yang mengalami keluhan dikarenakan banyaknya tanggungan sekolah anaknya, ada pula anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya, dan ada beberapa anak di Kelurahan Sisir yang berprestasi tetapi tidak bisa melanjutkan sekolah. Sehingga Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) perlu di implementasikan di Kelurahan Sisir.

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” biasanya digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, Winarno, (2014:19). Adapun suatu kebijakan merupakan dimana seorang aktor berperan sebagai pelaku dalam menentukan kebijakan yang dibuat. Sehingga dalam menentukan keputusan seorang pemerintah/pejabat harus teliti untuk pengambilan keputusan itu sendiri. Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan, Anderson dalam Winarno, (2014:21). Sehingga didalam kebijakan publik terdapat berbagai tahap dalam menentukan keputusan. Tahapan dalam kebijakan publik diperlukan agar proses yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis sesuai dengan yang direncanakan. Tahapan secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu urutan atau runtutan yang memiliki titik awal dan akhir. Dengan demikian, tahap-tahap kebijakan publik merupakan suatu urutan proses mulai dari titik awal hingga pada akhir dari kebijakan publik tersebut. Menurut Winarno dalam Larasati (2018) Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penyusunan Agenda, Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk

ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak bisa disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau adapula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan, Masalah yang telah masuk agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecah masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
3. Tahap Adopsi Kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut di adopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.
4. Tahap Implementasi Kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecah masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (Implementators), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
5. Tahap Evaluasi Kebijakan Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah ditentukan. Makmur dan Thahier dalam Setyawan (2017:91-92) memberikan definisi implementasi kebijakan sebagai suatu bentuk proses pemikiran dan tindakan manusia yang direncanakan secara baik, rasional, efisien dan efektif sebagai upaya mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam berbagai tugas negara atau pemerintah guna menciptakan kesejahteraan bersama berdasarkan pada keadilan dan pemerataan. Sedangkan menurut Nugroho dalam Setyawan (2017:92) memberikan batasan sangat sederhana mengenai implementasi kebijakan sebagai suatu cara agar sebuah kebijakan publik dapat mencapai tujuannya. Lebih lanjut ia memaparkan dua pilihan langkah mengimplementasikan kebijakan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan tersebut. Dari dua teori diatas dapat disimpulkan implementasi kebijakan merupakan suatu bentuk proses pemikiran dan tindakan manusia yang direncanakan secara baik, rasional, efisien dan efektif agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Program keluarga harapan (PKH) yaitu suatu program yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal untuk dapat menyalurkan bantuan tunai bersyarat kepada semua kalangan rumah tangga sangat miskin atau keluarga sangat miskin yang biasa disingkat dengan RTSM/KSM.. PKH ini bertujuan untuk dapat

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga diharapkan dapat mengubah sikap, prilaku, maupun pandangan RTSM/KSM itu sendiri supaya bisa dengan mudah mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, yang mana nantinya dapat diharapkan untuk memotong rantai kemiskinan yang terjadi disuatu wilayah. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target SDGs(*Sustainable Development Goals*).

Adapun secara khusus, tujuan dari PKH (Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 2013:12) terdiri atas:

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar (anak pra sekolah atau disingkat apras) dari RTSM;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM;
3. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM.

Jumlah bantuan tunai yang dapat diterima oleh peserta PKH nominalnya bervariasi, penentuan tersebut dilihat berdasarkan jumlah anggota keluarga yang dihitung menurut aturan penerimaan bantuan, baik dari sisi komponen kesehatan maupun pendidikan. Dimasa yang akan datang jumlah besaran bantuan yang diterima dapat berubah sesuai dengan kondisi keluarga pada saat itu atau bila peserta PKH tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.

Pendamping dibutuhkan karena:

1. Sebagian besar RTSM/KSM mempunyai keterbatasan kemampuan dalam memperjuangkan haknya. Untuk itu dibutuhkan pendampingan, dalam membantu mendapatkan haknya yang patut mereka peroleh dari PKH.
2. Pendamping membantu tugas-tugas UPPKH mendeteksi segala permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam waktu cepat.

Pendamping PKH adalah seseorang yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan PKH, dan terikat dengan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI. Pendamping adalah MATA dan TELINGA bagi PKH. Untuk memberi jaminan dalam proses kerja dilapangan, Kementerian Sosial mewajibkan setiap Pendamping untuk mengasuransikan diri dengan dana yang diberikan.

Secara kelembagaan, Pendamping harus melaporkan seluruh kegiatan dan permasalahannya ke Sekretariat UPPKH Kabupaten/Kota (Dinas Sosial) dan Koordinator Wilayah.

Tugas Pendamping meliputi:

1. Tugas Pokok
2. Tugas Pengembangan pendamping
3. Tugas Penunjang

Kemiskinan merupakan persoalan yang menyangkut manusia dan berkaitan dengan sifat yang melekat padanya. Kata miskin mengacu pada dimensi ekonomi atau kemiskinan materi. Menurut Friedman dalam Putra, (2009) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan dalam hal untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial yang dimaksud terdiri dari : sumber keuangan (pekerjaan, kredit), modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), jaringan sosial untuk memperoleh barang dan jasa, organisasi sosial dan politik yang dapat mencapai kepentingan bersama (partai politik, organisasi sosial, koperasi), serta pengetahuan dan keterampilan dan atau informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan fokus penelitian yaitu: Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan yang meliputi: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan yang meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat.

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah melalui kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto dan data statistik. Menurut Moleong (2014:157) Sumber data terdiri dari: Kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik. Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *teknik snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan.

Berdasarkan fokus penelitian pada rumusan masalah yang pertama dimana peneliti lebih berfokus pada implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

Komunikasi

Proses komunikasi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut tentunya menjadi tanggungjawab UPPKH Kabupaten/Kota dan pendamping dalam melaksanakan tugasnya. Komunikasi juga menjadi dasar dalam pelaksanaan program keluarga harapan karena dengan adanya komunikasi hubungan antara pendamping dengan masyarakat menjadi baik. Pendamping juga melakukan temu kunjung bulanan dengan petugas kesehatan dan pendidikan di lokasi pelayanan. Kegiatan temu kunjung dilaksanakan minimal sebulan sekali dan bertempat di unit pelayanan (sekolah/puskesmas yang dipilih secara berdasar kemudahan akses) oleh pendamping dan penyedia layanan terkait (pendidikan atau kesehatan) diwilayah kelurahan masing-masing.

Lingkup kegiatan meliputi diskusi dan berbagi pengetahuan untuk mengetahui perkembangan pelayanan dan program keluarga harapan, sebagai sarana untuk memberikan motivasi kepada peserta program keluarga harapan dalam menjalankan komitmen. Pemberian motivasi dilakukan kepada peserta program keluarga harapan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Motivasi lebih ditekankan kepada peserta program keluarga harapan yang rentan untuk mengabaikan komitmen agar tidak terkena sanksi.

Pendamping akan turun langsung kemasyarakat dan melakukan kerjasama antara peserta program keluarga harapan. Pendamping juga menerima dan menggali keluhan yang menjadi permasalahan yang dihadapi peserta program keluarga harapan, kemudian pendamping harus melaporkan seluruh kegiatan dan permasalahannya kesekretariat UPPKH Kabupaten/Kota (Dinas Sosial) dan Koordinator Wilayah. Jadi pendamping sangat dibutuhkan dalam melakukan tindak lanjut dalam waktu cepat dan juga mempermudah UPPKH Kabupaten/Kota dalam mendeteksi segala macam permasalahan yang ada. Dengan adanya kerjasama antara pihak UPPKH Kabupaten/kota, pendampingan dan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam mensukseskan program keluarga harapan.

Proses komunikasi dalam pelaksanaan program keluarga harapan sudah sangat baik, dengan adanya tanggung jawab, memberikan motivasi dan menggugah kesadaran peserta program keluarga

harapan tentang pentingnya menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan disekitar tempat tinggalnya. Pendamping juga rutin dalam melakukan pertemuan dengan peserta program keluarga harapana. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut adalah:

- a. Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh peserta program keluarga harapan.
- b. Menginformasikan atau bersosialisasi kepada RTSM peserta program keluarga harapan dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum.
- c. Mengelompokkan peserta kedalam 5 kelompok peserta program keluarga harapan untuk mempermudah tugas pendampingan.

Sumber Daya

Sumber daya sangatlah penting bagi masyarakat untuk mengembangkan pola pikir masyarakat. Hal ini, juga dibutuhkan seorang pendamping untuk mengarahkan mereka bagaimana agar lebih berusaha mandiri untuk kedepannya. Mengingat kualitas SDM masyarakat di Kelurahan Sisir terutama ibu-ibu rumah tangganya masih jauh dari standart. Sehingga pendampingan yang intensif sangatlah perlu. Supaya penyaluran dana PKH dapat tepat sasaran, bukan hanya digunakan sebagai foya-foya atau untuk hal yang tidak seharusnya. Adanya kerjasama antara pendamping dengan masyarakat sangat berguna dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha kelompok bersama yang dilakukan dengan rutin. Harapannya peserta program keluarga harapan lebih berkembang dan lebih mandiri untuk kedepannya.

Disposisi

Disposisi atau sikap didalam suatu pelaksanaan kebijakan merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena para pelaku kebijakan memiliki suatu keinginan, kemauan, dan kecenderungan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh. Jika sikap atasan yang baik akan memberikan contoh terhadap bawahannya. Dalam hal ini juga harus diperlukan keseimbangan pandangan bahwa kebijakan dilaksanakan untuk memenuhi tujuan organisasi sehingga kebijakan menyentuh harapan yang sejatinya adalah mencapai tujuan.

Disposisi atau sikap sangat berpengaruh dalam melakukan kerjasama antara atasan, pendamping dan juga dengan masyarakat dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Jika suatu sikap yang baik akan berdampak positif bagi masyarakat ataupun sebaliknya. Pemerintah Kota Batu selaku pihak pelaksana program keluarga harapan kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat penerima program keluarga harapan. Untuk selalu berusaha menumbuhkan rasa kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu. Dengan dibantu seorang pendamping akan lebih mempermudah berjalannya pelaksanaan program keluarga harapan tersebut.

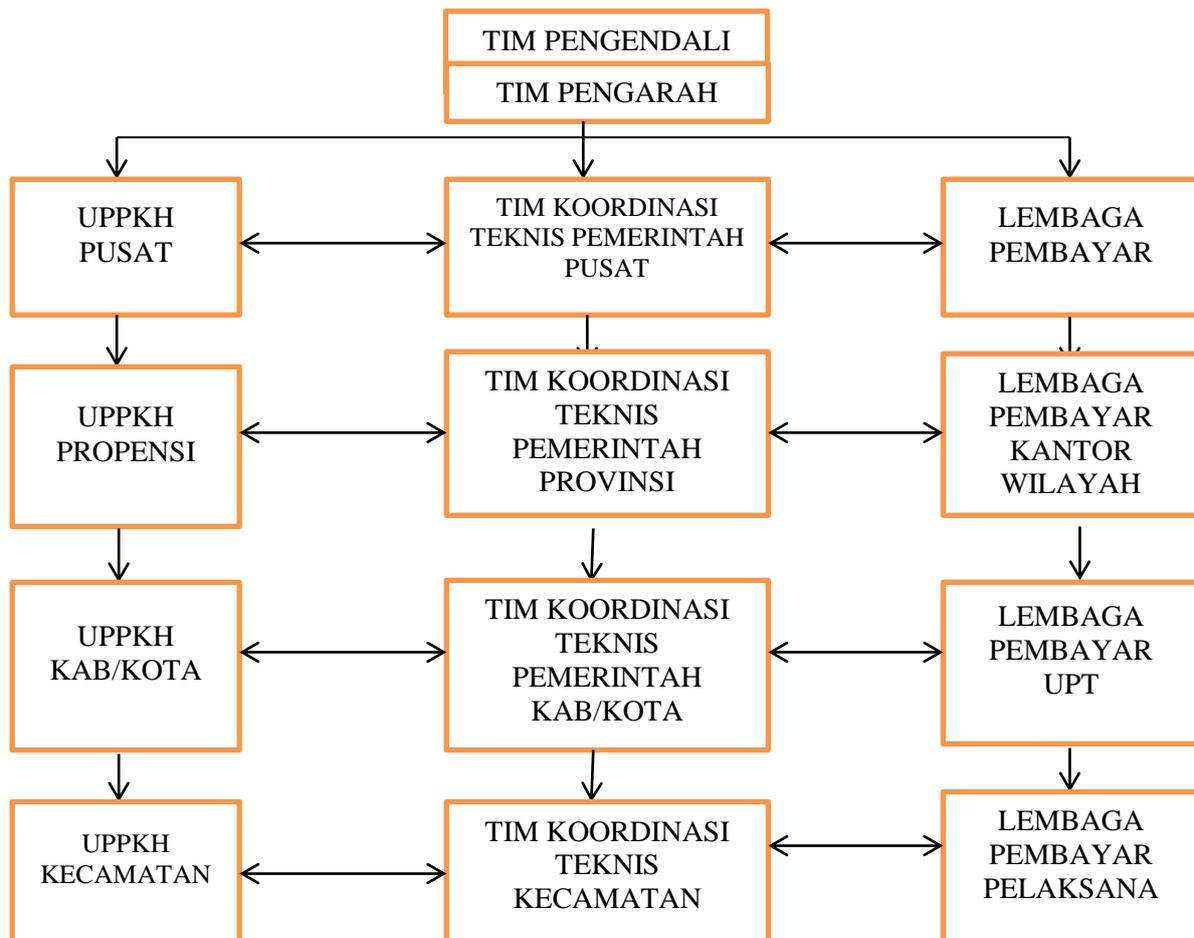
Selain itu, Pihak Kelurahan Batu terus mengupayakan supaya peserta PKH selalu mendorong mereka untuk rutin dalam melaksanakan pertemuan, apalagi jika terdapat surat langsung dari Provinsi maupun Kota. Begitu juga halnya, yang dilakukan oleh pendamping PKH di Kelurahan Sisir yang selalu tanggap dan memberikan pelayanan terbaik bagi peserta program keluarga harapan dengan selalu bersikap sabar, bersikap akrab, menghargai dan rendah hati. Pendamping juga yang akan turun langsung jika ada permasalahan yang dihadapi oleh peserta program keluarga harapan. Mengakomodasi segala jenis pengaduan yang terkait dengan pelaksanaan program keluarga harapan dan penanganan penyelesaiannya sebagai suatu proses dan itikad baik yang akan sangat bermanfaat bagi penyempurnaan dan kelancaran pelaksanaan program keluarga harapan.

Struktur Birokrasi

Terkait dengan struktur birokrasi, biasanya para pelaksana sudah mengetahui apa yang menjadi kewajiban, sehingga paha terhadap pekerjaan yang segarsnya segera dilaksanakan. Struktur Birokrasi pelaksana PKH itu berasal dari Propinsi sampai Kabupaten/Kota terdiri dari unit pelaksana program keluarga harapan namanya UPPKH, yang mana untuk ketuanya dipegang dari Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kota/Kabupaten. Dari Kementerian Sosial diwakili oleh koordinator kota, koordinator kabupaten dan pendamping KPM. Untuk koordinasinya dari pendamping ke koordinator Kota, koordinator Kota ke koordinator wilayah, koordinator wilayah baru ke kementerian ini untuk pendampingan. Tapi jikalau menyangkut pelaksanaan bantuan dengan monitoring dan evaluasi di masing-masing Kabupaten/Kota itu berupa uunit pelaksana. Ketuanya kepala bidang yang membidangi, sekretaris kepala seksi yang membidangi. Struktur organisasi UPPKH ada ketua, sekretaris dan anggota.

Terkait struktur birokrasi memang sudah ada alurnya. Dimana pelaksanaan program keluarga harapan dari pusat turun ke provinsi selanjutnya turun ke kabupaten/kota lalu baru ke kecamatan. Kerangka struktur birokrasi PKH dapat dilihat gambar dibawah ini sebagai berikut:

Gambar 1.
STRUKTUR BIROKRASI PKH



Sumber : Analisis Data, 2018

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Faktor Pendukung Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Dalam pelaksanaan program keluarga harapan tidak akan pernah terlepas dari faktor yang mendukung atau mensukseskan dalam pelaksanaannya. Berikut petikan dari beberapa pihak terkait tentang apa saja faktor pendukung pelaksanaan program keluarga harapan.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program keluarga harapan di tunjukkan bahwa adanya tanggung jawab dan rasa kepedulian terhadap masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program keluarga harapan. Dengan adanya dorongan dan dukungan dari pendampingan, peserta program keluarga harapan akan lebih sadar dan lebih meningkatkan taraf hidupnya untuk menjadi yang lebih baik. Bagaimana cara mendorong peserta program keluarga harapan untuk selalu menyadari akan pentingnya hidup yang layak dan berusaha mengembangkan pola pikir mereka untuk hidup lebih mandiri kedepannya.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Adapun faktor penghambat pasti ada hal ini ditunjukkan bahwa faktor penghambat cenderung muncul karena kurangnya tanggapan dari pihak atasan terhadap masalah yang dihadapi oleh peserta program keluarga harapan. Tidak terlepas juga dari peserta program keluarga harapan untuk selalu lebih sadar akan pentingnya teknologi. Sehingga lebih mempermudah dalam proses pelaksanaan program keluarga harapan. Tindakan itulah yang menjadi salah satu kendala yang harus diperhatikan. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan program keluarga harapan juga perlu adanya kerjasama antara pendampingan dan peserta program keluarga harapan untuk lebih meningkatkan akan pentingnya pendidikan yang layak dan tingkat kesehatan yang memadai dan lebih mengembangkan lagi pola pikir terkit dengan teknologi yang masih kurang. Diharapkan juga untuk pihak atasan agar lebih memperhatikan dan lebih peduli kepada peserta program keluarga harapan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir, yang pertama Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sisir dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dapat ditinjau dari beberapa hal: Proses komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan program keluarga harapan dalam memenuhi tujuan dan harapan yang diinginkan bersama sudah terlaksana dengan adanya tanggungjawab, memberikan motivasi dan menggugah kesadaran peserta program keluarga harapan untuk lebih berkembang dan mandiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi program keluarga harapan adalah faktor Pendukung dalam Implementasi program keluarga harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari adanya tanggungjawab pendamping kepada peserta program keluarga harapan untuk selalu mendorong mereka agar lebih sadar akan pentingnya teknologi dan hidup yang lebih layak.

Faktor Penghambat dalam Implementasi program keluarga harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan cenderung muncul karena kurangnya tanggapan dari pihak atasan terhadap masalah yang dihadapi oleh peserta program keluarga harapan. Tidak terlepas juga dari peserta program keluarga harapan untuk selalu lebih sadar akan pentingnya teknologi. Sehingga lebih mempermudah dalam proses pelaksanaan program keluarga harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jaminan Sosial, 2013. *Direktorat Jenderal Pelindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI*.
- Larasati, D. (2018). *Evaluasi Program Inovasi “Sunset Policy” di Kota Malang guna Menurunkan Angka Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan*. Reformasi, 7 (1). Retrieved from <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/694>.
- Moleong, 2014. *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Putra, Andika. 2009. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia media.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Penerbit PT. Buku Seru Jakarta.